

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

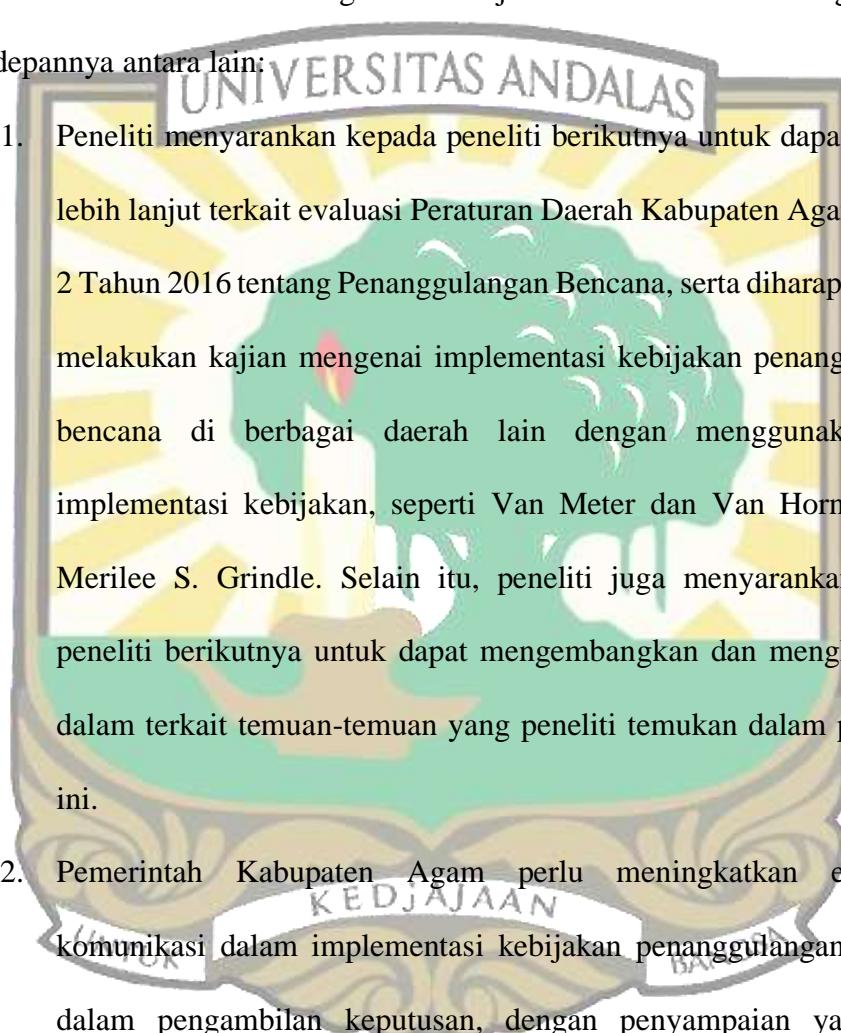
#### **6.1 Kesimpulan**

Mengacu pada hasil analisis dan temuan data di lapangan, dapat disimpulkan bahwasannya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Sungai Pua pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Akan tetapi, implementasi kebijakan penanggulangan bencana tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, lantaran masih ditemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaanya yaitu pada tahap pemulihan pascabencana dan semua indikator yang disampaikan oleh Edwards III tidak terlaksana dengan baik.

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya serta asumsi yang telah dibangun pada rumusan masalah, bahwa memang terdapat keterbatasan sumber daya, khususnya dalam aspek finansial, kurang efektifnya koordinasi antar pelaksana serta rendahnya sikap dan kinerja birokrasi dalam menjalankan kebijakan. Hal ini tampak nyata dalam tahap penanggulangan bencana pada fase pemulihan pascabencana, dimana upaya penanggulangan bencana belum dapat terlaksana secara optimal. Komunikasi dua arah dengan masyarakat minim sehingga timbul resistensi, keterbatasan dan pengelolaan sumber daya finansial yang belum optimal untuk pemulihan ekonomi masyarakat, sikap pelaksana yang tidak konsisten pada seluruh tahapan implementasi kebijakan penanggulangan bencana, serta rendahnya kinerja birokrasi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Sungai Pua, terdapat beberapa saran dan masukan sebagai bahan rujukan dan rekomendasi bagi peneliti lain kedepannya antara lain:

- 
1. Peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, serta diharapkan dapat melakukan kajian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana di berbagai daerah lain dengan menggunakan teori implementasi kebijakan, seperti Van Meter dan Van Horn maupun Merilee S. Grindle. Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat mengembangkan dan mengkaji lebih dalam terkait temuan-temuan yang peneliti temukan dalam penelitian ini.
  2. Pemerintah Kabupaten Agam perlu meningkatkan efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana dalam pengambilan keputusan, dengan penyampaian yang jelas, terarah, disertai interaksi yang memungkinkan masyarakat memahami secara menyeluruh prosedur dan program yang terdapat dalam kebijakan penanggulangan bencana, sehingga tidak terdapat lagi penolakan dari masyarakat.

3. Saran berikutnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, adalah memanfaatkan dengan baik dukungan sumber daya finansial yang tersedia dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana agar pelaksanaan setiap tahapan kebijakan dapat berjalan optimal, kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, beban permasalahan masyarakat dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dijalankan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam perlu memperkuat koordinasi antar instansi pemerintahan, terutama pada tahap pemulihan pascabencana, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat, cepat, dan menyeluruh, sehingga keberhasilan implementasi kebijakan dapat tercapai secara optimal.

